



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon: 031-5340707, Faksimili: 031-5345496
Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, Surel: bidkumhamjatim@gmail.com

Nomor : W15.PP.04.02- 172 22 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri
(Surat Selesai Harmonisasi).

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.342/1279/419.033/2023 Tertanggal 17 November 2023 Perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bangunan Gedung telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si.
NIP 196506051988111001

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 5 Mei 2025

Nomor : 100.3.2/15023 /013.2/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Kediri

Yth. Walikota Kediri
di
KEDIRI

Sehubungan surat Pj. Walikota Kediri tanggal 28 Juni 2024 Nomor 100.3.2/685/419.033/2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Timur.
2. Ketua DPRD Kota Kediri.

LAMPIRAN : SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3.2/ 15023 /013.2/2025
TANGGAL : 5 MEI-2025

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG**

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Konsiderans Menimbang	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Agar dirumuskan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
3.	BAB I KETENTUAN UMUM	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum harus:	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup

	Pasal-1 ...	<p>a. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada penggunaan istilah yang baku sesuai ketentuan.</p> <p>b. Mengacu ketentuan dalam Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.</p> <p>c. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.</p>	kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
4.	Pasal 75 (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pemeliharaan; dan b. Pemugaran.	Ayat (2) agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku antara lain Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
5.	Pasal 132 (4) Dokumen perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:	Ayat (4) agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 194 Peraturan	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

	<p>a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan;</p> <p>b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama dan serah terima akhir dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;</p> <p>c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi;</p> <p>d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan; dan</p> <p>e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi; dan surat pernyataan kelaikan fungsi.</p>	<p>Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>	<p>Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>
--	--	---	--

6.	<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> <p>(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Profesi Ahli dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Teknis; b. perguruan tinggi atau pakar; dan c. Profesi Ahli. 	<p>Ayat (3) agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 232 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>(8) Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah Daerah; b. Melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap PBG dan ketentuan SMKK pada tahap pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan mekanikal elektrikal; c. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam SIMBG pada setiap tahapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi; d. meminta justifikasi teknis kepada Pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis dengan 	<p>Ayat (8) agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 236 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>

	<p>gambar rencana kerja yang disebabkan oleh kondisi lapangan;</p> <p>e. memberikan peringatan kepada penyelenggara Bangunan Gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan ketentuan manajemen keselamatan konstruksi;</p> <p>f. melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah dan mengunggahnya ke dalam SIMBG;</p> <p>g. menyaksikan;</p> <p>h. membuat laporan pelaksanaan pengujian dalam SIMBG; dan</p> <p>i. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.</p>		
8.	<p>Pasal 156</p> <p>...</p> <p>Pasal 157</p> <p>...</p>	<p>Agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 281 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>
9.	<p>Pasal 159</p>	<p>Agar dirumuskan kembali dalam hal dan</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan peraturan</p>

		dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 267 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	perundang-undangan berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
10.	Pasal 162 ...	Agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 297 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
11.	Pasal 168 ...	Agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 312 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
12.	Pasal 170 ...	Agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku antara lain

		peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 322 dan Pasal 324 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
13.	<ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan dan sistematika pengaturan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah yang berkaitan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah serta ketentuan mengenai Bangunan Gedung. - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah agar dilengkapi dasar pertimbangan, pengkajian, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, akuntabel, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. - Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang beserta perubahannya. 		

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011

Surabaya, 15 Desember 2025

Nomor : 100.3/ 45470/013.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri

Yth. Wali Kota Kediri
Cq. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Kediri
di
KEDIRI

Sehubungan surat Wali Kota Kediri tanggal 12 Desember 2025 Nomor 100.3.2/1809/419.033/2025 perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah Kota Kediri bersama ini disampaikan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bangunan Gedung sepanjang telah disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan Nomor Register sebagai berikut:

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 305-7/2025;

Nomor Register tersebut supaya dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dan selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Biro Hukum,



Adi Saron, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.198104042010011017